

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arba, H.M. 2019. *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunanegara. 2008. *Rakyat & Negara dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Jakarta: Tatanusa.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muliawan, Jarot Widya. 2016. *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Nawari, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, Mohammad. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Salindeho, John. 1994. *Manusia, Tanah, Hak, dan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Santoso, Urip. 2007. *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong. 2004. *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Sumardjono, Maria S.W. 2015. *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia: dari Keputusan Presiden sampai Undang-Undang*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. 2001. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi & Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- _____. 2008. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Sugiharto, Umar Said, dkk. 2015. *Hukum Pengadaan Tanah: Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*. Malang: Setara Press.
- Sunggono, Bambang. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rajawali Pers.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tehupeiory, Aartje. 2017. *Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

B. Artikel/Jurnal/Karya Ilmiah

GG Kasenda, Dekie. "Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum". *Jurnal Morality*, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 17. Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya (diakses pada 19 Oktober 2020).

Ibrahim, Wahyu. 2019. "Konsinyasi dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum". Tesis. Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Langelo, Rosana Dewi. "Penetapan Lokasi dan Akibat Hukumnya terhadap Pembayaran Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum". *University of Bengkulu Law Journal (UBELAJ)*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 74. Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (diakses pada 30 November 2020).

Sahnan, M. Yazid Fathoni, dan Musakir Salat. "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pembebasan Tanah bagi Kepentingan Umum". *Jurnal IUS*, Vol. 3, No. 9, Desember 2015, hlm. 428. Fakultas Hukum Universitas Mataram (diakses pada 13 Juli 2021).

Salim, Wilmar dan Siwage Dharma Negara. "Infrastructure Development under the Jokowi Administration: Progress, Challenges and Policies". *Journal of Southeast Asian Economies*, Vol. 35, No. 3, 2018, hlm. 386–401. ISEAS – Yusof Ishak Institute (diakses pada 1 Desember 2020).

Samudra, Elvareta Bayu. 2019. "Prinsip Keadilan pada Konsinyasi Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum". Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama.

Simanjuntak, Meilya Normawaty. “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Berhak Atas Tanah Dalam Hal Ganti Rugi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”. *Premise Law Journal*, Vol. 10, 2015, hlm. 7. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (diakses pada 2 April 2021).

Wantu, Fence M. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, 2012, hlm. 484. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (diakses pada 1 Desember 2020)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. “Arti Kata Narasumber”. Diakses pada 30 November 2020 dari <https://kbbi.web.id/narasumber>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. “Arti Kata Responden”. Diakses pada 30 November 2020 dari <https://kbbi.web.id/responden>.

Sistem Informasi Infrastruktur Terintegrasi Provinsi Jawa Timur. “Jalan Tol Pandaan-Malang”. Diakses pada 30 Maret 2021 dari http://www.sifrater.jatimprov.go.id/index.php/tolPanmal_user.

Wikipedia. “Proyek Strategis Nasional”. Diakses pada 1 Desember 2020 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Proyek_Strategis_Nasional.

E. Sumber Lainnya

Agusdiono, Raden. Panitera Pengadilan Negeri. 2021. “Wawancara tentang Konsinyasi Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang di Kabupaten Pasuruan”. Pengadilan Negeri Bangil.

Budiono. Sekretaris Desa Purwodadi. 2021. “Wawancara tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang di Desa Purwodadi”. Balai Desa Purwodadi.

Dikin. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sekarmoyo. 2021. “Wawancara tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang di Desa Sekarmoyo”. Balai Desa Sekarmoyo.

Dito. Staf Pejabat Pembuat Komitmen. 2021. “Wawancara tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang di Kabupaten Pasuruan”. Kantor Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Jalan Tol Pandaan-Malang.

- Handoko, Wiwit. Sekretaris Desa Pakukerto. 2021. “Wawancara tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang di Desa Pakukerto”. Balai Desa Pakukerto.
- Munir, Muhammad. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Capang. 2021. “Wawancara tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang di Desa Capang”. Balai Desa Capang.
- Naqshobandi. Kepala Desa Lemahbang. 2021. “Wawancara tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang di Desa Lemahbang”. Balai Desa Lemahbang.
- Pramono, Suhadi. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan. 2021. “Wawancara tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang di Kabupaten Pasuruan”. Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan.
- Wardoyo, Diyanto. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bangil. 2021. “Wawancara tentang Konsinyasi Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang di Kabupaten Pasuruan”. Pengadilan Negeri Bangil.
- Widiasti, Ika. Sekretaris Desa Parerejo. 2021. “Wawancara tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang di Desa Parerejo”. Balai Desa Parerejo.